



UPDATE KEADILAN

Periode: 14 - 18 Februari 2005

Terbitan 5/2005

1. APRECIO GUTERRES – ORANG KEEMPAT YANG DIBEBASKAN OLEH PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT (SPSC)

Pada tanggal 14 Februari 2005, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat membebaskan Aprecio Guterres, yang dituduh melakukan tiga belas pembunuhan pada tahun 1999. Ini keempat kali SPSC memerintahkan pembebasan (walapun pembebasan Paulino de Jesus yang diperintahkan oleh SPSC dirubah oleh Pengadilan Tinggi, sehingga hanya tiga pembebasan tetap beraku).

Setelah beberapa mosi dari pihak pembela ditolak pada tanggal 18 Januari 2005 (lihat Update Keadilan 2/2005) sidang perkara pokok dimulai pada tanggal 28 Januari.

Saksi pertama adalah janda dari seorang korban dari ketiga belas orang yang menurut dakwaan dibunuh oleh Guterres. Saksi tersebut tidak mengidentifikasi bahwa terdakwa Aprecio Guterres mengambil bagian dalam pembunuhan suaminya. Saksi kedua menyatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Saksi ketiga, seorang mantan anggota milisi, telah memberitahu seorang penyidik bahwa dia melihat korban utama— Carlos Maia – ditikam oleh Aprecio Guterres dan seorang lain. Namun, di pengadilan, dia menyatakan bahwa dia tidak melihat Aprecio Guterres menikam korban. Dia menyatakan bahwa setelah pembunuhan tersebut, terdakwa Aprecio Guterres berdiri di hadapan kerumunan orang dan menunjukkan pisau yang berdarah dan berteriak “ini darah Carlos Maia”. Namun, berulang kali dia menyangkal bahwa dia melihat Guterres menusuk Maia.

Setelah kesaksian dari Amaral, Jaksa mempertimbangkan kembali kasusnya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan dakwaan (karena surat dakwaan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Amaral kepada penyidik dan Amaral telah merubah pernyataannya dalam persidangan). Jaksa menyatakan bahwa tidak ada saksi lain yang akan dipanggil yang dapat menyatakan bahwa mereka sebenarnya melihat pembunuhan Carlos Maia.

Pada tanggal 9 Februari Jaksa memohon Pengadilan untuk mencabut surat dakwaan terhadap Guterres. Jaksa mengatakan tidak bermaksud untuk menyampaikan bukti lain dan memohon Pengadilan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti yang telah ada.

Pihak pembela menyatakan bahwa dakwaan harus ditolak tanpa syarat apapun, melalui putusan untuk membebaskan terdakwa. Pihak pembela mengacu pada putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya oleh SPSC dalam kasus Jaksa Penuntut

Umum vs. *Florindo Moreira*, No. 19/2003. Keadaan dalam kedua kasus tersebut mempunyai banyak kesamaan, yaitu dalam kedua kasus ini Jaksa memohon untuk mencabut surat dakwaan karena saksi-saksi utama merubah kesaksiannya dalam persidangan. Dalam kasus *Florindo Moreira* Pengadilan memutuskan bahwa prinsip tentang peradilan dan keadilan yang layak bagi terdakwa berarti bahwa Pengadilan harus mengabulkan pembebasan.

Pada tanggal 14 Februari Pengadilan memutuskan bahwa Guterres tidak bersalah. Putusan tertulis akan dikeluarkan di kemudian hari.

JSMP menyambut putusan SPSC untuk melaksanakan diskresinya dengan menyelesaikan kasus ini tanpa menjalani persidangan sampai tuntas. Walaupun Pengadilan membuang-buang waktu dan sumber daya dengan melanjutkan kasus ini setelah November 2004, padahal sudah jelas bagi semua orang, termasuk pihak kejaksaan, bahwa dakwaan tidak dapat dibuktikan (lihat Update Keadilan No.12/2004 dan No.2/2005), JSMP menyambut putusan yang pada akhirnya diambil oleh Pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini pada tanggal 14 Februari.

2. PENERAPAN UNDANG-UNDANG SECARA SELEKTIF OLEH SEORANG HAKIM INTERNASIONAL DI PENGADILAN DISTRIK DILI

Pada tanggal 17 Februari JSMP mencoba untuk memantau kasus kekerasan seksual yang digelar di Pengadilan Distrik Dili.

Sebelum sidang dimulai hakim internasional yang mengadili kasus tersebut menanyakan usia dua wartawan yang hadir di Pengadilan. Ketika mereka berdua menjawab bahwa mereka berusia 18 tahun, hakim tersebut mengatakan bahwa 'anak-anak' tidak diperkenankan untuk mengikuti persidangan di pengadilan.

Dengan ini JSMP mengingatkan para petugas yudisial yang bekerja di Timor Leste bahwa, berdasarkan Bagian 28.1 dari Regulasi UNTAET 30/2000, sebagaimana diamendemen oleh Regulasi 25/2001:

“Persidangan harus terbuka untuk umum.”

JSMP tidak mengetahui tentang suatu undang-undang yang berlaku di Timor Leste yang menyatakan bahwa orang-orang yang berusia 18 tahun ke bawah tidak diperkenankan untuk menghadiri persidangan.

19 peserta latihan asal Timor Leste juga berada di bagian ruangan pengadilan yang terbuka untuk umum (yaitu pada hakim, jaksa dan pembela nasional) dari Pusat Latihan Yudisial (JTC) Ke-19 peserta latihan menjelaskan kepada JSMP bahwa hakim internasional yang mengadili kasus ini, yang pada pagi hari itu dijadwalkan untuk memberikan latihan akademis di JTC, sebenarnya memutuskan untuk membawa mereka ke Pengadilan untuk menyaksikan hakim tersebut mengadili persidangan itu.

Setelah membuka sidang, Hakim tersebut mengumumkan bahwa persidangan itu tidak terbuka untuk umum, dan meminta semua orang yang berada di bagian ruangan pengadilan yang terbuka untuk umum untuk meninggalkan pengadilan, kecuali ke-19 peserta latihan dari JTC.

Menurut Bagian 28.2:

“Pengadilan dapat melarang akses publik terhadap sebagian atau seluruh sidang dalam keadaan-keadaan dimana: (b) diperlukan untuk melindungi privasi orang-orang, seperti dalam kasus kekerasan seksual atau kasus yang menyangkut anak di bawah umur.”

JSMP tidak mengerti mengapa hakim internasional tersebut menerapkan Bagian 28.2 dalam hal ini terhadap orang-orang tertentu dari ‘masyarakat umum’. Kalau hakim memutuskan untuk mencegah kehadiran “masyarakat umum” dalam suatu persidangan berdasarkan alasan yang diuraikan dalam Bagian 28.2(b), maka pasti hal ini berarti semua orang, selain daripada para pihak yang terlibat dalam kasus itu (hakim, jaksa, pembela, panitera, penterjemah, terdakwa, dan saksi), harus dilarang menghadiri persidangan. Walaupun para peserta latihan dari JTC sebelumnya adalah hakim, jaksa dan pembela (dan diduga bahwa mereka akan kembali menjalankan fungsi ini setelah menyelesaikan latihannya di JTC), mereka tentu saja bukan pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual yang diadakan pada tanggal 17 Februari. Oleh karena itu JSMP tidak mengerti mengapa hakim tersebut memutuskan untuk menerapkan Bagian Article 28.2 secara selektif untuk memperkenankan kehadiran mereka selama sidang tersebut. JSMP tidak mengetahui tentang suatu undang-undang yang menyatakan bahwa, untuk keperluan Bagian 28.2, para peserta latihan di JTC bukan anggota “masyarakat umum”.

Oleh karena itu, JSMP mengimbau kepada semua petugas yudisial untuk menerapkan undang-undang Timor Leste secara konsisten kepada setiap orang yang berada di Timor Leste.